

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Hery (2009) Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktikbisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu, pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut *agent*. *Agent* (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dalam memperoleh *return* maksimal dan harapan manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri atau disebut tindakan *moral hazard* (Haryani, 2011).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Akibat dari asimetri ini adalah *agent* mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal* (Agrianti, 2009). Adanya asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua masalah potensial yaitu:



*adverse selection* dan *moral hazard*. Kedua masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu bertindak oportunistis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan investor. *Adverse selection* terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan *moral hazard* terjadi karena perilaku manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania dkk, 2013).

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada *shareholders* bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013).

Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku *agent* apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan *principal* dengan *agent* dalam mengelola perusahaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen sebagai pihak agen memberikan pertanggung jawabannya kepada pemegang saham (prinsipal) dalam bentuk laporan keuangan. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, maka penting untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. Integritas laporan keuangan adalah suatu keadaan dimana laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menunjukkan informasi tidak bias. Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan konservatisme akuntansi (Dewi dan Putra, 2016).

## 2.2. Teori Keputusan

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak diraih. Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Teori Keputusan Normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan prinsip rasionalitas, dan (2) Teori Keputusan Deskriptif yaitu teori tentang bagaimana keputusan secara faktual dibuat (Hansson, 2005) dalam (Rusnadi, 2014).

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa tahapan proses. Condorcet membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga tahap antara lain: proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, proses mengeliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan (Hansson, 2005) dalam (Rusnadi, 2014).

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua golongan besar, yakni model pembautan keputusan secara runtut (*sequential*

*models*) dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (*non sequential models*). Model pembuatan keputusan secara runtut mengamsusikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear, sedangkan model pembuatan keputusan tidak secara runtut mengamsusikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler (Hansson, 2005) dalam (Rusnadi, 2014).

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan sering kali menambahkan pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Disisi lain seorang individu yang bersifat tertutup, tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Dikehidupan nyata kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi (Hansson, 2005) dalam (Rusnadi, 2014).

### **2.3. Integritas Laporan Keuangan**

#### **2.3.1. Pengertian Integritas Laporan Keuangan**

Mulyadi (2002) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Menurut Pancawati Hardiningsih (2010), integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Berdasarkan berbagai pengertian integritas laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan merupakan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyajian laporan keuangan secara jujur dengan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan sesungguhnya.

### 2.3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reability* (Kieso, 2007) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reability* memiliki kualitas sebagai berikut:

#### 1) Daya Uji (*Verifiability*)

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

#### 2) Ketepatan Penyajian (*Representational faithfulness*)

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

#### 3) Netralitas (*Neutrality*)

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

### 2.3.3. Pengukuran Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan prinsip konservatisme dan manajemen laba (*earnings management*). Hal ini dikarenakan informasi dalam laporan keuangan akan lebih berintegritas apabila laporan

keuangan tersebut konservatif dan tidak *overstate* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut (Mayangsari, 2003) dalam (Astria, 2011).

#### 1) Konservatisme

Suwardjono (2008) dalam (Fajaryani, 2015) mendefinisikan konservatisme sebagai sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan mengorbankan sesuatu guna meminimalkan atau menghilangkan risiko. Konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui utang dan kerugian yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan aset atau laba lebih rendah serta melaporkan utang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun (*downside risk*) dari laporan posisi keuangan yang menyajikan aset bersih *understatement* dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu (Fajaryani, 2015).

Laporan keuangan yang menerapkan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi biaya agensi yang muncul sebagai akibat dari asimetri informasi. Sri dan Fitriany (2010) dalam Fajaryani (2015) mengklasifikasikan pengukuran konservatisme sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Model Basu

Basu (1997) dalam Fajaryani (2015) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini dikarenakan kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*. Dalam modelnya, Basu menggunakan model *piecewise-linear regression* sebagai berikut:

$$NI = \beta_0 + \beta_1 RET + \beta_2 NEG + \beta_3 RET * NEG + \varepsilon$$

NI adalah laba per lembar saham sebelum adanya *extraordinary items*. RET adalah tingkat pengembalian saham, sedangkan NEG adalah variabel *dummy* di mana angka 1 untuk tingkat pengembalian negatif dan 0 untuk tingkat pengembalian positif. Menurut model Basu, perusahaan menerapkan akuntansi konservatif apabila  $\beta_3$  sebagai reaksi antara tingkat pengembalian dan variabel *dummy* menunjukkan hasil positif. Hal ini didasarkan pada asumsi pasar saham lebih cepat bereaksi terhadap *bad news* daripada *good news* (Basu, 1997) dalam Fajaryani (2015).

## b) Model Zhang

Penman dan Zhang (2002) dalam Fajaryani (2015), melakukan pengukuran konservatisme lainnya dengan menggunakan *conv\_accrual* yang diperoleh dengan membagi jumlah biaya riset dan pengembangan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambah biaya depresiasi kemudian dibagi dengan *Net operating assets*. *Net operating assets* diukur dengan kewajiban keuangan bersih yaitu (total hutang ditambah total saham ditambah total dividen, kemudian dikurangi dengan kas ditambah total investasi). Semakin tinggi nilai *conv\_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

$$\frac{C_{it} = RP_{it}^{res} + DEPR_{it}^{res}}{NOA_{it}}$$

Keterangan:

- $C_{it}$  = Indeks konservatisme perusahaan i pada tahun t  
 $RP_{it}^{res}$  = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan i pada tahun t  
 $DEPR_{it}^{res}$  = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan i pada tahun t  
 $NOA_{it}$  = Net operating assets, yang diukur dengan kewajiban keuangan bersih yaitu (total hutang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi) perusahaan i pada tahun t

## c) Model Givoly dan Hayn

Dwiputro (2009) dalam Savitri (2016) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif.

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aset yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang terdapat dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan Savitri (2016).

$$\text{CONACC}_{it} = \text{NI}_{it} - \text{CFO}_{it}$$

Keterangan:

- CONACC<sub>it</sub> = *Conservatism index* perusahaan i pada tahun t.  
 NI<sub>it</sub> = *Net income* sebelum *extraordinary item* ditambah dengan depresiasi dan amortisasi.  
 CFO<sub>it</sub> = *Cash flow* dari kegiatan operasi

## d) Model Beaver dan Ryan

Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan di mana nilai aset *understatement* dan kewajiban *overstatement* dapat diketahui dengan menggunakan *market to book ratio*. *Market to book ratio* yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1 mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Wahyuni dan Fitriany, 2010) dalam Fajaryani (2015).

Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya mengindikasikan pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang investor baik dengan memiliki laba dan arus kas aman dan mengalami pertumbuhan terus menerus dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan tingkat pengembalian yang rendah. Rasio *market to book value* yang bernilai lebih dari 1 yang berarti bahwa investor bersedia membayar saham lebih besar dari nilai buku akuntansinya terjadi terutama karena nilai aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak mencerminkan baik itu inflasi maupun *goodwill*. Aset yang telah dibeli beberapa tahun yang lalu dicatat berdasarkan harga perolehan awal meskipun inflasi telah menyebabkan nilai aset mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, kelangsungan usaha yang berhasil juga menyebabkan nilai aset yang sebenarnya naik secara signifikan Fajaryani (2015).

$$ILK_{it} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 2) Manajemen Laba (*Earnings Management*).

Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan dapat memicu tindakan manajemen laba (*earnings management*). Healy dan Wahlen dalam Jama'an (2008) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan pertimbangan, misalnya pertimbangan yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aset tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai asset. Disamping itu, manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Watts dan Zimmerman (1990) dalam Fajaryani (2015) menyatakan terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi manajemen laba, antara lain:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Hipotesis Rencana Bonus

Pemberian bonus berdasarkan laba yang diperoleh akan mendorong manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode berjalan.

## b) Hipotesis Utang

Semakin tinggi utang suatu perusahaan atau semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer akan terdorong untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang rendah melalui pemilihan prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

## c) Hipotesis Biaya Politis

Perusahaan besar kemungkinan akan memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi, maka pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. Belakoui dan Ahmed R. (2007) mendefinisikan secara operasional manajemen laba sebagai potensi penggunaan manajemen akrual guna memperoleh keuntungan pribadi. Total akrual dapat dihitung dengan mengurangi arus kas operasi dari laba bersih periode berjalan.

### 2.3.4. Manfaat Integritas Laporan Keuangan

Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga

memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak *stakeholders*.

## 2.4. Mekanisme *Corporate Governance*

### 2.4.1. Defenisi dan pengukuran *Corporate Governance*

Menurut Deni, dkk (2004) dalam Hardiningsih (2010) *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Sedangkan menurut Nasution dan Setiawan (2007) *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

*Corporate governance* dapat membantu *Board of Directors* mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.1.1. Kepemilikan Institusional

Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dengan kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan *corporate governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan *monitoring* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak pemegang saham institusional lainnya dapat membatasi perilaku manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan menjamin kemakmuran pemegang saham (Oktadella, 2011).

Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, ini merupakan salah satu alat ukur kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini diukur dengan membandingkan proporsi saham institusi di akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar. (Dewi dan Putra, 2016). Berikut adalah alat ukur untuk kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional (INST)} = \frac{\text{Jumlah saham milik institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 2.4.1.2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Oktadella (2011) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan manajemen merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga kedudukan manajer sejajar dengan pemilik perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan (Oktadella, 2011).

Kepemilikan saham manajemen juga diukur dengan cara yang sama yaitu dengan membandingkan proporsi jumlah saham manajemen akhir tahun terhadap jumlah saham yang beredar. Adanya kepemilikan manajemen dip perusahaan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah keagenan, yaitu dengan menyalarkan kepentingan antara principal dan manajemen (Dewi dan Putra, 2016). Berikut adalah alat ukur kepemilikan manajerial:

$$\text{Kepemilikan Manajerial (MANJ)} = \frac{\text{Jumlah saham milik manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

### 2.4.1.3. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Oktadella, 2011). Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut).

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Astina, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site: [www.uin-suska-riau.ac.id](http://www.uin-suska-riau.ac.id)  
 Email: [info@uin-suska-riau.ac.id](mailto:info@uin-suska-riau.ac.id)  
 Phone: +62 812 780 0000



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen serta mampu menerapkan unsur keadilan, maka pentingnya peran dari komisaris independen. Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota dewan komisaris (Nuryaman, 2009). Berikut adalah alat ukur komisaris independen:

$$\text{Komisaris Independen (KOIND)} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

#### 2.4.1.4. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari tiga anggota dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan (*financial expert*).

Komite audit adalah mekanisme *corporate governance* internal yang diharapkan dapat melakukan supervisi atau pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan proses audit. Berdasarkan pada aturan yang berlaku keputusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 menyatakan bahwa suatu perusahaan yang telah *go public* wajib memiliki komite audit, maka pengukuran komite audit tidak dapat lagi didasarkan pada ada atau tidaknya. Penelitian ini menggunakan pengukuran yaitu jumlah dari anggota komite audit dalam perusahaan (Wahyudi dkk, 2014). Berikut adalah alat ukur komite audit:

$$\text{Komite Audit (KOAD)} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

#### 2.4.2. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat dari *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Hardiningsih, 2010).

#### 2.5. *Audit Tenure*

##### 2.5.1. Defenisi *Audit Tenure*

*Audit tenure* adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Tenur audit dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Auditor dapat memperoleh

pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Selain itu tenur audit terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, tenur audit dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor (Sari dan Rahardja, 2011).

Beberapa kasus skandal akuntansi menyebutkan bahwa lamanya hubungan klien dan auditor menjadi penyebab kegagalan audit. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun serta kurang dari 5 tahun tidak dapat menemukan kesalahan pelaporan yang material. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (Astinia, 2013).

### 2.5.2. Pengukuran *Audit Tenure*

*Audit Tenur* adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan *auditee* yang sama, jadi dapat di ukur dengan jumlah tahun KAP yang tetap mengaudit klien yang sama merupakan variabel *dummy*, tenur lama (3 tahun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih) diberi angka 1 dan tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 (Astina, 2013).

Audit Tenure (AT) =  
 Tenure lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan  
 tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0  
 (*dummy*)

### 2.5.3. Manfaat *Audit Tenure*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas audit dari seorang auditor, dan memberikan opini yang tepat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berintegritas.

## 2.6. Ukuran Perusahaan

### 2.6.1. Defenisi Ukuran Perusahaan

Sudarmaji dan Sularto (2007) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin

besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Nuryaman (2009) mengungkapkan perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.

### 2.6.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset. Total aset penjualan maupun nilai pasar ekuitas perusahaan menjadi faktor penentu dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar komponen perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan tersebut.

Berikut beberapa rumus dalam menghitung ukuran perusahaan :

#### 1. Ukuran perusahaan dilihat dari Total Aset

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2015) komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aset dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aset lancar yaitu aset-aset yang relatif mudah untuk dikonversi menjadi uang, dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Aset lancar meliputi; kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.
- Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur dengan jelas (tangible) dan yang bersifat permanen. Aset tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2 yaitu: aset tetap berwujud (gedung, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) dan aset tetap tidak berwujud (goodwill, hak cipta, hak paten, franchise dan merek dagang)
- Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kriteria di atas.

Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanamkan maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat luas. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total aset:

$$SIZE = Ln (total asset)$$

Keterangan :

Size = Ukuran perusahaan  
 LnTA = Logaritma natural dari total asset

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ukuran perusahaan dilihat dari Total Penjualan

Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Kasmir (2015) penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu, laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya juga akan mempengaruhi ukuran perusahaan dihadapan para investor dan pihak berkepentingan lainnya. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total penjualan :

$$SIZE = LN (\text{total penjualan})$$

Keterangan :

Size = Ukuran perusahaan  
 LnTS = Logaritma natural dari total penjualan

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total aset dan total penjualan. Hal ini dikarenakan besarnya total aset dan total penjualan masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset dan total penjualan perlu di Ln kan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7. Pandangan Islam Tentang Integritas Laporan Keuangan

Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah:

- a. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya
- b. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Sedangkan dalam akuntansi tujuan dalam pencatatan adalah:

- a. Pertanggung jawaban atau sebagai bukti transaksi
- b. Penentuan pendapatan
- c. Informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya (Harahap, 2005). Integritas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan dibuat dengan benar dan adil serta disajikan dengan jujur, oleh karena itu dalam pembuatan laporan keuangan harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam Islam Prinsip kejujuran laporan keuangan juga terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

Yang artinya: “181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu  
 Termasuk orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan  
 yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan  
 janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 184. dan  
 bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang  
 dahulu”.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, juga  
 menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba  
 perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar  
 dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya  
 fungsi auditing. Selain itu didalam Al-qur’an juga dijelaskan tentang larangan  
 mengambil harta orang lain dengan cara batil yaitu pada surat An Nisa Ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  
 memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan  
 perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”.*

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Etika dalam akuntansi syariah melarang seorang akuntan untuk mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual-beli. Seperti pada kasus salah satu perusahaan pertambangan yaitu PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) yang telah mengakuisisi dua perusahaan tambang yaitu PT Takaras Inti Lestari (TIL) dan PT Murui Jaya Perdana (MJP). Sementara PT. CKRA belum membayar kepada kedua perusahaan tambang tersebut, akan tetapi PT. CKRA telah mengakuinya sebagai modal dalam laporan keuangan yang telah menyesatkan para pengguna laporan keuangan seperti investor dan pemerintah.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan pustaka dari hasil penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Judul: Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan Peneliti & tahun: Ni Kadek Harum Sari Dewi & I Made Pande Dwiana	<i>Corporate Governance</i> yang diprosikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manejerial dan komisariss independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak	Objek penelitian perusahaan manufaktur sedangkan penulis menggunakan perusahaan pertambangan, tahun 2011-2013 sedangkan peneliti menggunakan	Persamaannya terletak pada variable mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan integritas laporan keuangan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putra / 2016 Sampel : Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2013 Metode Analisis: Regresi linier berganda Sumber : <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> . Vol.15 No.3.	berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.	tahun periode 2014-2016, peneliti menambahkan variable <i>audit tenure</i> dan ukuran perusahaan.	
2 Judul : Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> , <i>Audit Tenure</i> , dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan Peneliti & Tahun: Ocktavia Nicolin & Arifin Sabeni / 2013 Sampel : perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011 Metode Analisis: Regresi linier berganda Sumber : <i>Diponegoro Journal of Accounting</i> . Vol 2, No. 3	Struktur <i>corporate governance</i> proporsi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah positif. Sedangkan Struktur <i>corporate governance</i> kepemilikan saham manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. <i>Audit tenure</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap	Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur pada tahun 2008-2011, sedangkan penulis menggunakan perusahaan pertambangan pada tahun 2014-2016, dan penulis menggunakan variable ukuran perusahaan sebagai variable independennya.	Persamaannya terletak pada variable <i>Corporate Governance</i> , <i>Audit Tenure</i> dan integritas laporan keuangan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		integritas laporan keuangan.		
3	Judul : Pengaruh <i>corporate governance</i> , <i>audit tenure</i> dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan Peneliti & Tahun : Rani Arinasari / 2016 Sampel : Perusahaan perbankan syariah di BEI 2011-2014 Metode Analisis: Regresi linier berganda Sumber : Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta	<i>Corporate governance</i> yang di proksikan dengan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan dewan direksi berpengaruh negative signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.	Penelitian ini menggunakan objek perusahaan perbankan syariah pada tahun 2011-2014, sedangkan penulis menggunakan objek perusahaan pertambangan dan pada tahun 2014-2016, dan penulis menggunakan variable ukuran perusahaan sebagai variable independennya.	Persamaannya terletak padavariabel <i>corporate governance</i> , <i>audit tenure</i> dan integritas laporan keuangan
4	Judul : The Independence Of Auditor, Corporate Governance, Audit Quality And Audit Tenure On The Integrity Of Financial Statement	Independence of auditor, institutional ownership, audit committee, independent commissioner, and audit quality does not have an influence on the integrity of financial statement	Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic indeks tahun 2010-2014 sedangkan penulis menggunakan perusahaan	Persamaannya terletak pada variable corporate governance, audit tenure dan integritas laporan keuangan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Peneliti &amp; Tahun : Jundi nuri azhar / 2016 Sampel : Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2010-2014 Metode Analisis : Reggresi linier berganda Sumber : Skripsi. State Islamic University Of Sunan Kalijaga. Yogyakarta</p>	<p>but audit tenure have influence on the integrity of financial statement in Jakarta Islamic index periode 2010-2014</p>	<p>sektor pertambangan tahun 2014-2016, selain itu penulis menggunakan variable ukuran perusahaan sebagai variable independennya.</p>	
5	<p>Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan Peneliti &amp; Tahun : Atik Fajaryani / 2015 Sampel : Perusahaan pertambangan di BEI tahun 2008-2013 Metode Analisis : Analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda Sumber : Jurnal Nominal.Vol. 4 No. 1</p>	<p>Kepemilikan Institusional, leverage, spesialisasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan tahun 2008-2013, sedangkan penulis menggunakan tahun 2014-2016, selain itu penulis menggunakan variable <i>corporate governance</i> yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen sedangkan penelitian ini</p>	<p>Persamaannya terdapat pada dua variable proksi <i>corporate governance</i> yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dan juga menggunakan variable ukuran perusahaan. Penelitian ini juga dilakukan pada sektor pertambangan</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			hanya menggunakan kepemilikan manejerial dan kepemilikan institusional, dan penulis menggunakan variable <i>audit tenure</i> sebagai variable independennya	
6	<p>Judul : Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Peneliti &amp; Tahun : Wahyudi saputra, Desmiawati, dan Yuneita Anisma / 2014</p> <p>Sampel : Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012</p> <p>Metode Analisis : Analisis regresi berganda</p> <p>Sumber : Jom Fekon. Vol. 1 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian ini kepemilikan institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sedangkan reputasi KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012, sedangkan penulis mengambil objek perusahaan pertambangan tahun 2014-2016, selain itu <i>Corporate Governance</i> dalam penelitian ini hanya di proksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manejerial sedangkan penulis menambah komite audit dan komisaris independen, dan juga</p>	<p>Persamaanya terletak pada variable corporate governance, ukuran perusahaan dan integritas laporan keuangan.</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penulis menambahkan variable independen nya dengan <i>Audit Tenure</i>	
7	<p>Judul : Pengaruh <i>Corporate Governance</i>, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan keuangan</p> <p>Peneliti &amp; Tahun : Ida Ayu Sri Gayatri dan I Dewa Gede Dharma Suputra / 2013</p> <p>Sampel : Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2009-2012</p> <p>Metode Analisis : Regresi linier berganda</p> <p>Sumber : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013): 345-360</p>	<p>Mekanisme <i>Corporate Governance</i> diproksi dengan tiga variabel bebas dalam hipotesis yaitu, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.</p> <p>Komisaris independen dan komite audit tersebut setelah diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan namun, hanya kepemilikan institusional yang tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan</p>	<p>Objek penelitian pada perusahaan manufaktur, sedangkan penulis menggunakan perusahaan pertambangan, tahun penelitian dilakukan pada 2009-2012, sedangkan penulis menggunakan tahun 2014-2016. Peneliti juga menambahkan variable <i>audit tenure</i></p>	<p>Persamaannya terletak pada variable <i>Corporate Governance</i>, ukuran perusahaan dan integritas laporan keuangan</p>





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengawasi perusahaan secara baik karena pihak institusional memiliki kemampuan yang profesional dalam bidangnya, sehingga perusahaan akan merasa diawasi oleh pemegang saham institusional. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>1.1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

### 2.9.1.2. Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Oktadella (2011) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan manajemen merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga kedudukan manajer sejajar dengan pemilik perusahaan.

Penelitian Dewi & Putra (2016), Hardiningsih (2010) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Saputra dkk (2014), Fajaryani (2015) dan Nicolini & Sabeni (2013) menyatkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain

dirinya sendiri. Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan manajemen akan berintegritas (Oktadella, 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>1,2</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### 2.9.1.3. Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Oktadella, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Putra (2016), Nicolin & Sabeni (2013) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Arinasari (2016), Azhar (2016) dan Hardiningsih (2010) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), sehingga laporan yang dihasilkan akan berintegritas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>1,3</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

#### 2.9.1.4. Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari tiga anggota dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan (*financial expert*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nicolin & Sabeni (2013) dan Putra dan Muid (2012) menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putra (2016), Arinasari (2016) dan Azhar (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, karena komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga direksi atau manajemen perusahaan merasa diawasi oleh komite audit dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>1,4</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### 2.9.2. *Audit Tenure* terhadap Integritas Laporan Keuangan

*Audit tenure* adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Tenur audit dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Selain itu tenur audit terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, tenur audit dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor (Sari dan Rahardja, 2011).

Penelitian Arinasari (2016), Nicolin & Sabeni (2013) dan Astinia (2013) menunjukkan hasil bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini karena auditor menjalankan tugas dilaksanakan secara professional dan tetap menjaga independensi dalam melakukan audit atas laoran keuangan, sehingga kualitas laporan keuagnan yang dihasilkan dapat dijamin. Masa perikatan yang singkat maupun lama antara KAP maupun perusahaan klien tidak mempengaruhi pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan klien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian Azhar (2016), Giri (2010) menunjukkan hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, karena seorang auditor dalam menjalankan tugas mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak menjaga independensinya oleh karena itu hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor tidak menggambarkan integritas laporan keuangan.

*Audit Tenure* dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, jangka waktu kerja sama yang lama antara auditor dan klien nya atau perusahaan dalam akan menimbulkan hubungan pribadi antara auditor dan perusahaan, auditor akan mengaudit laporan keuangan sesuai dengan keinginan perusahaan, sehingga independensi dan kualitas audit akan menurun dan berdampak pada rendahnya integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasar penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Audit tenure* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### 2.9.3. Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan

Sudarmaji dan Sularto (2007) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015), Wahyudi dkk (2014) dan Gayatri & Saputra (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran Perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan maka integritas laporan keuangan akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elfrida Sinaga (2014), Astinia (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, Karena semakin besar perusahaan maka semakin banyak basis pemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan akan berdampak besar bagi kepentingan publik. Ukuran perusahaan yang besar akan lebih dituntut oleh *stakeholders* untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

#### **2.9.4. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, *Audit Tenure*, dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Dalam penelitian ini akan diuji apakah semua variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H<sub>4</sub>: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### 2.10. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable independen, yaitu Mekanisme *Corporate Governance*, *Audit Tenure* dan Ukuran Perusahaan , Sedangkan variabel dependen ada satu yaitu Integritas Laporan Keuangan.

Gambar 2.1

